

RINGKASAN

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah perusahaan yang banyak dan meningkat setiap tahunnya, namun pertumbuhan ekonomi di sektor industri cenderung mengalami penurunan. Penelitian ini juga mengkaji tentang pengaruh PDRB, IPM, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, upah minimum, dan infrastruktur jalan terhadap aglomerasi industri di Jawa Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan 26 kabupaten/kota dan dengan kurun waktu 5 tahun yaitu 2017-2021. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random effect model*. Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB dan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap aglomerasi industri, sedangkan variabel tingkat partisipasi angkatan kerja berpengaruh positif terhadap aglomerasi industri. Kemudian ada dua variabel yang berpengaruh negatif terhadap aglomerasi industri yaitu variabel Upah minimum dan infrastruktur jalan.

Adapun implikasi penelitian yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dengan cara menyetarakan rata-rata lama sekolah yaitu dengan menuntaskan program wajib belajar 12 tahun serta menyertakan sarana dan prasarana untuk menunjang Pendidikan, kemudian mengadakan pembinaan soft skill kepada para tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SD, SMP agar mereka bisa bersaing di pasar kerja. Penyediaan berbagai macam beasiswa pendidikan untuk masyarakat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat mewujudkan kenaikan upah minimum namun dengan tidak menjadikan perusahaan berpindah ke daerah lain yang upahnya lebih rendah. Hal tersebut caranya adalah mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum dan juga memberikan tunjangan yang lebih besar daripada upah pokok, sehingga para tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat menambah produktivitas sehingga aglomerasi industri akan meningkat. Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu meningkatkan Infrastruktur jalan agar aglomerasi meningkat, caranya dengan memperbaiki jalan yang rusak, melakukan Pembangunan sarana jalan, memperpanjang jalan hingga ke daerah-daerah, membangun prasarana jembatan, membangun sarana angkutan dan melakukan perbaikan terhadap jalan yang berlubang atau bahkan jalan yang rusak berat.

Hasil penelitian ini terbatas pada pengamatan yang relatif pendek yaitu hanya 5 tahun, hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan data mengenai jumlah tenaga kerja industri mikro dan kecil hanya ada 5 tahun. Kemudian penelitian ini juga terbatas pada lokasi penelitian yang hanya pada 26 kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat karena terdapat salah satu kabupaten yang data infrastrukturnya terbagung ke dalam Kabupaten Ciamis yaitu Kabupaten Pangandaran. Penelitian ini juga terbatas pada variabel independen yang digunakan yaitu PDRB, IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, upah minimum, dan infrastruktur jalan saja yang mempengaruhi aglomerasi industri.

Kata Kunci : PDRB, IPM, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Upah Minimum, Infrastruktur Jalan, Aglomerasi Industri

SUMMARY

West Java Province has a large number of companies and is increasing every year, but economic growth in the industrial sector tends to decline. This research also examines the influence of GRDP, HDI, labor force participation rate, minimum wage, and road infrastructure on industrial agglomeration in West Java. The data used in this research is panel data with 26 districts/cities and a period of 5 years, namely 2017-2021. This type of research is quantitative research. The method used in this research is the random effect model. The research results can be concluded that the GRDP and HDI variables do not have a significant effect on industrial agglomeration, while the labor force participation rate variable has a positive effect on industrial agglomeration. Then there are two variables that have a negative effect on industrial agglomeration, namely the minimum wage and road infrastructure variables.

The implications of the research are that the West Java Provincial Government needs to increase the Labor Force Participation Level by equalizing the average length of schooling, namely by completing the 12 year compulsory education program and including facilities and infrastructure to support education, then providing soft skills development for workers with educational levels. Elementary, middle school so they can compete in the job market. Providing various types of educational scholarships for the community. It is hoped that the West Java Provincial Government can realize an increase in the minimum wage but without forcing companies to move to other areas where wages are lower. The way to do this is to propose a suspension of the implementation of the minimum wage and also provide allowances that are greater than the basic wage, so that workers can meet their needs and increase productivity so that industrial agglomeration will increase. The West Java Provincial Government needs to improve road infrastructure so that agglomeration increases, by repairing damaged roads, building road facilities, extending roads to other areas, building bridge infrastructure, building transportation facilities and repairing potholes or even damaged roads. heavily damaged.

The results of this research are limited to relatively short observations, namely only 5 years, this is due to limited data regarding the number of workers in micro and small industries, only 5 years. Then this research is also limited to research locations which are only 26 districts/cities in West Java province because there is one district whose infrastructure data is the largest in Ciamis Regency, namely Pangandaran Regency. This research is also limited to the independent variables used, namely GRDP, HDI, Labor force participation rate, minimum wage, and road infrastructure which influence industrial agglomeration.

Keywords: *GRDP, HDI, Labor Force Participation Rate, Minimum Wage, Road Infrastructure, Industrial Agglomeration*